

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PUBLIKASI INFORMASI KEUANGAN PADA WEBSITE RESMI PEMERINTAH DAERAH SE-JAWA TENGAH

Eva Anggra Yunita

Universitas Pancasakti, Jln Halmahera No.01 Mintaragen Kota Tegal, Indonesia

evaanggra95@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out which factors have strong impact to the financial report publications on local government websites, due to the requirements of Good Government Governance, among others the principle of transparency and accountability. District/city governments in Central Java were selected as samples by consideration of the achievements and awards achieved related to transparency, accountability, and compliance. The variables used in this study were political competition, tenure, BPK audit options, total assets, leverage, and direct expenditure. Using Stata probit regression analysis tool, the results showed that the local governments in Central Java were in the increase of transparency and accountability stage, where this showed the success of the regional autonomy mission. There were upward trend of audit opinions and financial report publications on local government websites. All variables insufficiently affected internet publication of financial report. The political map did not become disincentive for local heads in order to increase the transparency of financial reporting.

Keyword: *political competition; internet publication; tenure; local government assets*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa sajakah yang paling kuat berpengaruh terhadap publikasi LKPD di website pemerintah daerah, seiring dengan tuntutan *Good Government Governance* yaitu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemda kabupaten/kota di Jawa Tengah dipilih sebagai sampel dengan pertimbangan prestasi dan penghargaan yang diraih terkait dengan transparansi, akuntabilitas serta ketahanan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetisi politik, masa jabatan, opsi audit BPK, total aset, leverage, dan pengeluaran langsung. Dengan menggunakan alat analisis regresi probit Stata diperoleh hasil bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah sedang berada dalam posisi transparansi dan akuntabilitas yang semakin baik, di mana hal ini menunjukkan keberhasilan misi otonomi daerah. Terjadi trend kenaikan hasil opini audit serta publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Seluruh variabel tidak mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Peta politik tidak menjadi penghambat kepala daerah dalam menegakkan transparansi pelaporan keuangan.

Kata kunci: *kompetisi politik; publikasi LKPD; masa jabatan; kekayaan daerah*

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan otonomi daerah yang didasari dengan Tap MPR No XV/MPR/1998 memiliki misi desentralisasi dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Dua manfaat desentralisasi yaitu: mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan; serta memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintah paling rendah (Shah, 1997) dalam (Mardiasmo, 2018). Untuk dapat mencapai kedua misi tersebut pemerintah daerah memerlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) yang meliputi 11 prinsip yaitu: keterbukaan dan transparansi, tanggung jawab, responsif, akuntabilitas, keadilan, partisipatif, anti korupsi, efisien dan efektif, kepastian hukum, pembangunan berkelanjutan; serta inovasi untuk perubahan lebih baik (Susanto, Samopa, & Wibowo, 2018). Tata pemerintahan juga melibatkan tiga pilar utama yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat (Rahman, 2018).

Diantara usaha untuk mendorong terciptanya prinsip keterbukaan dan transparansi adalah melakukan *e-Government* dan publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di internet. Pelaksanaan *e-Government* pada setiap instansi pemerintahan diharapkan dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien dengan meningkatkan komunikasi antara pemerintah, masyarakat maupun sektor usaha dan industri. Jawa Tengah termasuk dalam 10 provinsi dengan *e-Government* terbaik dengan skor 2,64

dari Kominfo. Sementara trend Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan dari 9,9 triliun pada tahun 2014 menjadi 12,5 triliun pada tahun 2018. Hal yang sama juga terjadi pada trend pelaporan LKPD di website pemerintah daerah (pemda). Dari 35 pemda di Jawa Tengah, terdapat 15 pemda yang melakukan publikasi LKPD di internet pada tahun 2014. Pada tahun 2015 naik menjadi 18 pemda dan menjadi 24 pemda pada tahun 2018.

Publikasi LKPD menjadi salah satu saluran transparansi pemda kepada masyarakat. Reformasi pelaporan keuangan dan digitalisasi pada pemda telah dilakukan di seluruh dunia. Tentu saja peningkatan kapasitas keuangan tersebut memerlukan sumber daya yang lebih baik. Seperti yang terjadi di Spanyol, (Fresneda Fuentes & Hernández Borreguero, 2018) menyatakan bahwa sumber daya yang memadai, pelatihan, software yang tepat, keterlibatan politik, serta ukuran pemda. Peraturan negara federal lebih banyak mempengaruhi kebijakan akuntansi perusahaan swasta dibanding kebijakan akuntansi pemerintah daerah di USA (Foltin, 2017). Sementara di Canada, transformasi digital pada pemda akan membantu sektor swasta dalam pengembangan usaha mereka serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah (Pittaway & Montazemi, 2020). Berdasarkan penjelasan dan fenomena di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah: Apa sajakah faktor yang mempengaruhi publikasi LKPD di internet pada pemda di Jawa Tengah?

Namun demikian, kondisi pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah sangatlah

beragam. Keragaman tersebut terdapat pada letak geografis serta kondisi alam setiap daerah. Perbedaan tersebut dapat dikerucutkan dalam beberapa hal seperti kompetisi politik dan kekayaan daerah. Pilkada pada setiap daerah di Jawa Tengah sangatlah bervariasi. Catatan KPUD menyatakan bahwa kekuatan partai politik sangat beragam di setiap daerah. Hal ini berimbas pada jumlah kontestan yang berbeda pada setiap perhelatan pilkada. Di satu sisi kekayaan alam yang disebabkan oleh setiap daerah juga berbeda. Seperti yang dinyatakan oleh (Fresneda Fuentes & Hernández Borreguero, 2018) bahwa total asset yang dimiliki pemda mempengaruhi peningkatan kapasitas pelaporan keuangan pemda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kompetisi politik, masa jabatan, opini audit BPK, kekayaan daerah, leverage, dan belanja daerah mempengaruhi publikasi LKPD di website pada pemda kabupaten/kota di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan sampel seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh banyaknya penghargaan yang diterima oleh Pemprov Jawa Tengah berupa tiga kali berturut – turut menerima pengarahannya dari KPK di bidang gratifikasi pada tahun 2019 sebagai Lembaga dengan Tingkat Kepatuhan Pelaporan Terbaik, sebagai provinsi terinovatif dalam *Innovative Government Award* 3 tahun 2019, provinsi terbaik Badan Publik Informatif 2019, dan provinsi dengan predikat terbaik capaian Aksi

Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi tahun 2019. Periode data yang digunakan adalah selama 5 tahun dari 2014 – 2018.

Definisi Operasional Variabel yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Variabel dependen: Publikasi LKPD di Internet
- Variabel publikasi LKPD diukur dengan menganalisis website setiap pemerintah daerah dan mencari tautan mengenai LKPD yang dilaporkan. Jika terdapat tautan LKPD di website maka diberikan nilai 1, jika tidak terdapat tautan LKPD diberikan nilai 0.

Variabel independen:

1. Kompetisi Politik
Kompetisi politik terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Setiap daerah memiliki jadwal Pilkada masing – masing. Variabel kompetisi politik diukur dengan menghitung jumlah pasangan Cabub/Cawalkot pada saat Pilkada, yang diperoleh dari KPUD.
2. Masa Jabatan
Kepada daerah diberikan kesempatan memimpin daerahnya sampai batas maksimal dua kali. Ketika jabatan ke dua maka kepala daerah tersebut disebut *incumbent*. Masa jabatan diukur dengan memberikan nilai 1 jika kepala daerah sedang dalam masa jabatan pertama, dan nilai 2 jika kepala daerah adalah *incumbent*.

3. Opini Audit BPK

Setiap LKPD diaudit oleh BPK dengan hasil akhir berupa opini audit. Variabel opini audit BPK diukur dengan memberikan nilai secara ordinal sebagai berikut:

- Nilai 5 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian
- Nilai 4 untuk opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraph penjelas
- Nilai 3 untuk opini Wajar Dengan Pengecualian
- Nilai 2 untuk opini Tidak Wajar
- Nilai 1 untuk opini Tidak Memberikan Pendapat.

4. Kekayaan Daerah

Variabel kekayaan daerah diukur dengan menghitung Logaritma Natural dari masing – masing Total Aset yang ada di Neraca LKPD.

5. Leverage

Variabel leverage diukur dengan menghitung rasio utang terhadap ekuitas dengan rumus sebagai berikut:

$$Lev = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

6. Belanja Daerah

Variabel belanja daerah terdapat pada Laporan Realisasi APBD (LRA) dengan manjumlahkan akun belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja lainnya, kemudian dilakukan logaritma natural pada masing – masing hasil penjumlahan.

Model regresi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Publication} = & \alpha + \beta_1 \text{PolComp}_{i,t} \\ & + \beta_2 \text{Tenure}_{i,t} \\ & + \beta_3 \text{Opinion}_{i,t} \\ & + \beta_4 \text{Assets}_{i,t} \\ & + \beta_5 \text{Leverage}_{i,t} \\ & + \beta_6 \text{Expend}_{i,t} + \varepsilon_{i,t} \end{aligned}$$

dimana:

- *Publication* = publikasi LKPD di website pemda
- *PolComp* = kompetisi politik
- *Tenure* = masa jabatan
- *Opinion* = opini audit BPK
- *Assets* = kekayaan daerah
- *Leverage* = rasio utang
- *Expend* = belanja daerah
- ε = *margin of error*

Analisis data menggunakan analisis regresi probit pada Stata 15 di mana sebelumnya dilakukan analisis deskriptif dan uji kelayakan model. Selanjutnya dilakukan uji hasil R-Square dan tabel klasifikasi atas variabilitas seluruh variabel independen terhadap publikasi LKPD di website pemda yang diperkuat dengan grafik ROC (*Receiver Operating Characteristic*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Jawa yang ditetapkan dengan Undang-undang No.10 Tahun 1950 tanggal 4 Juli 1950. Ibu kota Jawa Tengah adalah Semarang. Secara administratif Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Sebelum diberlakukannya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota

administratif, yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota - kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten, disusul dengan adanya 3 kabupaten yang memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri yaitu Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pekalongan. Hasil analisis deskriptif dari data yang diperoleh selama 5 tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Deskriptif

```
. summarize X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y, format separator(6)
```

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
X1	175	3.257143	1.216337	1	6
X2	175	1.297143	.4583113	1	2
X3	175	4.474286	.8828972	3	5
X4	175	28.82394	.4763742	28.11241	31.06407
X5	175	.0087634	.011926	6.31e-06	.0826749
X6	175	28.21	0.37	27.19	29.27
Y	175	.56	.4978113	0	1

Sumber: Stata 15, 2020

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa variabel kompetisi politik memiliki nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 6, dengan rata-rata sebesar 3,52. Variabel periode jabatan memiliki nilai minimum sebesar 1, nilai maksimum sebesar 2, dengan rata-rata sebesar 1,29. Variabel opini audit BPK memiliki nilai minimum sebesar 3, nilai maksimum sebesar 5, dengan rata-rata sebesar 4,47. Sementara variabel kontrol kekayaan daerah memiliki nilai minimum sebesar 28,112, nilai maksimum sebesar 31,064, dengan rata-rata sebesar 28,823. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0,00631, nilai maksimum sebesar 0,08267, dengan rata-rata sebesar 0,00876.

Dan variabel belanja daerah memiliki nilai minimum sebesar 27,193, nilai maksimum sebesar 29,27, dengan rata-rata sebesar 28,21.

Uji Goodness of fit

Pengujian model dilakukan dengan uji *goodness of fit*, dengan hasil seperti pada tabel 2:

Tabel 2. Goodness of fit

```
. estat gof
```

Probit model for Y, goodness-of-fit test

number of observations =	175
number of covariate patterns =	175
Pearson chi2(168) =	174.79
Prob > chi2 =	0.3439


```
. estat gof, group(10)
```

Probit model for Y, goodness-of-fit test

(Table collapsed on quantiles of estimated probabilities)

number of observations =	175
number of groups =	10
Hosmer-Lemeshow chi2(8) =	9.91
Prob > chi2 =	0.2713

Sumber: Stata 15, 2020

Dari hasil di atas diperoleh angka Prob Pearson dan Hosmer-Lemeshow masing – masing > 0,05 yang berarti bahwa model fit. Prob yang dihasilkan adalah 0,3439 dan 0,2713. Uji keseluruhan model juga dapat dilihat dari hasil *Log Likelihood* seperti pada tabel 3. Nilai *Log Likelihood* awal pada *iteration* 0 adalah -120,03772 dan pada *iteration* 3 diperoleh nilai *Log Likelihood* sebesar -116,1889. Penurunan nilai *Log Likelihood* ini menunjukkan bahwa model regresi baik atau dengan kata lain model dihipotesiskan fit dengan data.

Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baiknya hasil opini yang diterima tidak mampu memberikan efek pada probabilitas publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Hasil koefisien yang diperoleh adalah negatif, yang berarti semakin buruk hasil opini audit BPK tidak mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Opini audit merupakan target kinerja kepala daerah. Namun publikasi LKPD di website penda merupakan kebijakan strategis terkait transparansi informasi yang semakin menjadi tuntutan perkembangan lingkungan. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Saraswati, Budiarti, & Sudibyo, 2019) di Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; dan (Wicaksono & Prabowo, 2016).

4. Pengaruh positif kekayaan daerah terhadap publikasi LKPD

Dengan nilai z -0,56 dan P sebesar 0,574 lebih besar dari 0,025 maka hipotesis mengenai adanya pengaruh positif kekayaan daerah terhadap publikasi LKPD ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besarnya kekayaan suatu daerah tidak mampu memberikan efek pada probabilitas publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Hasil koefisien yang diperoleh adalah negatif, yang berarti semakin kecil total aset tidak mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Sebarapun besarnya kekayaan daerah sudah semestinya menjadi kewajiban penda untuk melaporkan kinerja atas pengolaannya. Hasil ini konsisten dengan penelitian (Rosita & Arifin, 2017), (Wicaksono

& Prabowo, 2016) dan (Priyastiwi & Saputra, 2019).

5. Pengaruh positif *leverage* terhadap publikasi LKPD

Dengan nilai z -1,36 dan P sebesar 0,174 lebih besar dari 0,025 maka hipotesis mengenai adanya pengaruh positif *leverage* terhadap publikasi LKPD ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besarnya rasio utang tidak mampu memberikan efek pada probabilitas publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Seperti halnya *debt covenant* pada perusahaan, maka penda juga wajib menjaga kondisi keuangannya dengan kreditur. Namun jenis kreditur pada penda dapat berupa pencairan anggaran yang tertunda kepada pihak ke tiga sehingga tidak terlalu mengikat penda untuk melakukan publikasi laporan keuangan. Nama akun yang digunakan adalah Utang Belanja yang berasal dari transaksi pembelian/pengadaan barang (Riyanto & Agus, 2015). Hasil koefisien yang diperoleh adalah negatif, yang berarti semakin kecil tingkat utang tidak mempengaruhi publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian (Laswad, Fisher, & Oyelere, 2005) dan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap publikasi LKPD di website penda di New Zealand, serta (Hanifah & Kiswanto, 2017) di Indonesia.

6. Pengaruh positif belanja daerah terhadap publikasi LKPD

Dengan nilai z 1,59 dan P sebesar 0,112 lebih besar dari 0,025 maka hipotesis

mengenai adanya pengaruh positif belanja daerah terhadap publikasi LKPD ditolak. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin besarnya belanja daerah tidak mampu memberikan efek pada probabilitas publikasi LKPD di website pemerintah daerah. Belanja daerah merupakan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kondisi daerah masing – masing. Belanja daerah termasuk dalam anggaran sehingga tujuannya adalah untuk diimplementasikan dan dievaluasi (Mardiasmo, 2018), sehingga tidak mempengaruhi apakah laporan keuangan akan dipublikasikan di internet ataupun tidak. APBD disusun dengan penuh dinamika yang terjadi pada setiap daerah (Hanida, 2010). Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian (Setiawan, 2019).

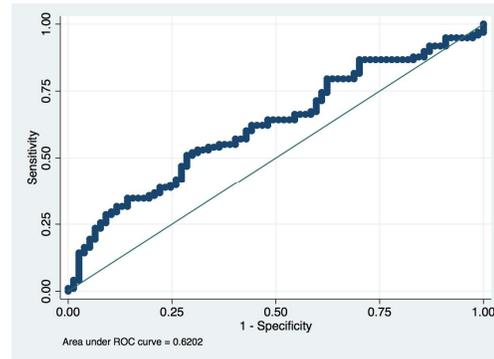
Persamaan model probit di atas dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Publication = & -11,674 + 0,162 PolComp \\ & + 0,178 Tenure \\ & + 0,018 Opinion \\ & - 0,150 Assets \\ & - 11,483 Leverage \\ & + 0,547 Expend + \varepsilon \end{aligned}$$

di mana *Publication* mempresentasikan prediksi probit atau pengukuran efek *size* di dalam regresi probit. Untuk lebih memperkuat hasil uji signifikansi bahwa tidak terdapat pengaruh kompetisi politik, periode jabatan, opini audit BPK, kekayaan daerah, *leverage*, dan belanja daerah terhadap publikasi LKPD di internet dapat dilihat pada Gambar 1 yaitu ROC. Dengan nilai kurva ROC = 0,6202 atau

< 0,7 berarti bahwa tidak terjadi diskriminasi. Sementara pilihan *cutpoint* yang optimal berada pada 0,57.

Gambar 1. Kurva ROC



Sumber: Stata 15, 2020

Uji *R-Square*

Nilai Pseudo R² yang dihasilkan pada tabel 4.3 adalah sebesar 0,0321. Model pengaruh kompetisi politik, periode jabatan, opini audit BPK, kekayaan daerah, *leverage*, dan belanja daerah terhadap publikasi LKPD di internet memiliki *R-Square* 0,0321. Atau dengan kata lain variabilitas publikasi LKPD di internet dapat dijelaskan oleh variabilitas kompetisi politik, periode jabatan, opini audit BPK, kekayaan daerah, *leverage*, dan belanja daerah sebesar 3,21%, sedangkan 96,79% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Tabel Klasifikasi

Dari hasil *command estate classification* diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. Klasifikasi

```
. estat classification
```

Probit model for Y

Classified	True		Total
	D	~D	
+	73	47	120
-	25	30	55
Total	98	77	175

Classified + if predicted Pr(D) >= .5
True D defined as Y != 0

Sensitivity	Pr(+ D)	74.49%
Specificity	Pr(~ ~D)	38.96%
Positive predictive value	Pr(D +)	60.83%
Negative predictive value	Pr(~D -)	54.55%
False + rate for true ~D	Pr(+ ~D)	61.04%
False - rate for true D	Pr(- D)	25.51%
False + rate for classified +	Pr(~D +)	39.17%
False - rate for classified -	Pr(D -)	45.45%
Correctly classified		58.86%

Sumber: Stata 15, 2020

Hasil di atas menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan pemerintah daerah melakukan publikasi LKPD di internet. Diprediksi sebanyak 120 kali pemda akan melakukan publikasi LKPD di internet, sedang hasil analisis terdapat 73 kali yang benar – benar melakukan publikasi LKPD atau tingkat prediksi klasifikasi sebesar 60,83%. Sementara sebanyak 55 kali pemda diprediksi tidak melakukan publikasi LKPD di internet, sedang hasil analisis terdapat 30 kali yang benar – benar tidak melakukan publikasi LKPD atau tingkat prediksi klasifikasi sebesar 54,55%. Total ketepatan klasifikasi atau kekuatan prediksi dari model regresi adalah sebesar 58,86%, dengan tingkat sensitivitas sebesar 74,49%.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas diperoleh hasil bahwa: 1). tidak terdapat pengaruh positif kompetisi politik terhadap publikasi LKPD di website pemerintah daerah; 2). tidak terdapat pengaruh positif masa jabatan kepala daerah terhadap publikasi LKPD di website pemerintah daerah; 3). tidak terdapat pengaruh positif opini audit BPK terhadap publikasi LKPD di website pemerintah daerah; 4). Tidak terdapat pengaruh positif kekayaan daerah terhadap publikasi LKPD di website pemerintah daerah; 5). tidak terdapat pengaruh positif *leverage* terhadap publikasi LKPD di website pemerintah daerah, dan; 6). tidak terdapat pengaruh positif belanja daerah terhadap publikasi LKPD di website pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah memiliki kecenderungan untuk meningkatkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan, seiring dengan peningkatan publikasi LKPD di website Pemda. Kecenderungan ini lebih disebabkan oleh niat dan keinginan mewujudkan *good government governance*. Hal ini mengimplikasikan bahwa terdapat suatu temuan yang baik di mana misi desentralisasi yang telah dicanangkan mulai dapat diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bracco, E., Porcelli, F., & Redoano, M. (2019). Political competition, tax salience and accountability. Theory and evidence from Italy. *European Journal of Political Economy*, 58, 138–163. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ej>

- poleco.2018.11.001
- Dharma, F., & Martani, D. (2016). Pengaruh Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Dan Kapasitas Keuangan Daerah Terhadap Keterpilihan Kepala Daerah Incumbent Pada Pemilukada. *SNA 19 Lampung*, (2006).
- Foltin, C. (2017). The role of federal regulation in state and local governments and the potential impact of new reforms: An assessment of the effectiveness of reporting, disclosure, and funding. *Research in Accounting Regulation*, 29(1), 19–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.racreg.2017.04.003>
- Fresneda Fuentes, S., & Hernández Borreguero, J. (2018). Institutional capacity in the accounting reform process in Spanish local governments. *Revista de Contabilidad-Spanish Accounting Review*, 21(2), 188–195. <https://doi.org/10.1016/j.rcsar.2018.05.002>
- Hanida, R. P. (2010). Dinamika Penyusunan Anggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program Dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Politik*, 3(1), 15–30.
- Hanifah, F. F., & Kiswanto. (2017). The Effect of Political Competition, HDI, and Leverage on The Availability and Accessibility of Local Financial Information on The Website. *Accounting Analysis Journal*, 6(2), 242–252. <https://doi.org/10.15294/aaj.v6i2.14281>
- Ika, R. (2018). *Pengaruh Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Leverage, Kompetisi Politik Dan Hasil Opini Bpk Terhadap Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Isni, A. (2018). *Analisis Kualitas Website Pemerintah Daerah pada Kabupaten se-Sumatera Barat*. Universitas Negeri Padang. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewFile/3860/2482>
- Khoerunnisa, M. (2019). Pengaruh Kekayaan Daerah, Tingkat Ketergantungan, Jumlah SKPD, Ukuran Legislatif, dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017). Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- KPU, K. P. U. R. I. Peraturan KPU No 3 Tahun 2017 (2017).
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Masthori, A., Nugroho, H., & Ferdiana, R. (2016). *Evaluasi Kualitas Website Pemerintah Kabupaten Sleman Menggunakan Metode Webqual Modifikasi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Nosihana, A., & Yaya, R. (2016). Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2), 89–104. <https://doi.org/10.24815/jdab.v3i2.5389>
- Pemerintah, P. PP No 8 Tahun 2006 (2006).
- Pittaway, J. J., & Montazemi, A. R. (2020). Know-how to lead digital transformation: The case of local governments. *Government Information Quarterly*, 101474. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101474>
- Priyastiwi, P., & Saputra, N. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Karakteristik Daerah Terhadap Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Internet. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 6(2), 157–172. <https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.356>
- Puspita, R., & Martani, D. (2012). *Analisis Pengaruh Kinerja Dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda*. Retrieved from <http://educipta.com/wp-content/uploads/2014/10/Analisis-Pengaruh-Kinerja-dan-Karakteristik-Pemda-terhadap-Tingkat-Pengungkapan-Kualitas-Informasi-dalam-Website-Pemda.pdf>
- Putra, K. Q. M. (2014). *Analisis Perbedaan*

- Kinerja Keuangan Kepala Daerah Incumbent Pada Periode I Dan Periode II Di Pemerintah Daerah Indonesia.* Universitas Sebelas Maret.
- Putri, M. Y. (2017). Pengaruh Dukungan Politik, Pendapatan Daerah, Periode Jabatan Dan Belanja Daerah Terhadap Budget Forecast Errors Pemerintah Daerah Di Sumatera, 1–17.
- Rahim, W. M., & Martani, D. (2016). Analisis Pengaruh Tingkat Akses Internet, Kompetisi Politik, Opini Audit, Karakteristik Pemda, dan Karakteristik Demografi terhadap Pengungkapan Informasi Keuangan dan Non Keuangan Website Pemerintah Daerah. In *Seminar Nasional Akuntansi* (Vol. 19, pp. 1–79).
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. Malang: UB Press.
- Riyanto, & Agus, P. (2015). *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rohman, F., & Kurniawan, D. (2017). Pengukuran Kualitas Website Badan Penanggulangan Bencana Menggunakan Metode Webqual 4.0. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*, 3(1 Agustus), 31–38. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/227263-pengukuran-kualitas-website-badan-nasion-4baeb62a.pdf>
- Rosita, L. R. A., & Arifin, J. (2017). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan dalam Website Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XX*, (April), 1–26.
- Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudiby, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya, 3(1), 85–101.
- Setiawan, D. (2019). Determinan Kualitas Pengungkapan Laporan Keuangan Dalam Website Pemerintah Daerah. In *Seminar Nasional Mahasiswa Unissula* (pp. 23–40). Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Susanto, T. D., Samopa, F., & Wibowo, R. P. (2018). Government Resource Planning (GRP): Potensi dan Tantangannya di Indonesia (pp. 826–839). Retrieved from <http://conference.binadarma.ac.id/index.php/semnastik/issue/view/10>
- Trisnawati, M. D., & Achmad, K. (2014). Determinan publikasi laporan keuangan pemerintah daerah melalui internet. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII*.
- Wicaksono, D., & Prabowo. (2016). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd114) Melalui Internet (Ifgr) Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis MEDIA EKONOMI*, XVI(1), 114–129.